

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA JAMBI**

TAHUN 2014-2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa maka tim penulis telah menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2014 – 2018.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diharapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi menjadi acuan bagi bidang-bidang dalam menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan dari bidang tersebut akan menjadi program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Jambi yang dimuat kedalam Rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Jambi 2014-2018.

Dengan demikian rencana strategis diharapkan akan dilengkapi dan disempurnakan hingga menjadi pedoman dibidang perencanaan pembangunan sektor perhubungan Kota Jambi.

TIM PENULIS

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
	1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI	
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	6
	2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Jambi	9
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi	10
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	14
BAB III	ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.....	16
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	17
	3.3. Telaahan Renstra K/L	18
	3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	20
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	21
	4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Jambi	22
	4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi.....	24

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.	25
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	31
BAB VII	PENUTUP	32
DAFTAR TABEL		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan	6
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 3	Aset Dinas Perhubungan Kota Jambi	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan bergulirnya era reformasi maka dituntut adanya perubahan paradigma dari seluruh kalangan yaitu pemerintah dan masyarakat. Salah satu fungsi perubahan paradigma tersebut dalam rangka menghilangkan kegiatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka pemerintah dituntut untuk menjadi pelayan masyarakat sehingga pemerintahan menjadi bersih dan mampu menyediakan public goods dan services dengan praktek yang terbaiknya dinamakan Good Governance (kepemerintahan yang paling baik). Good Governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme dan etos kerja dan moral yang tinggi.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negara.

Dalam rangka pengembangan dan penetapan sistim pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance.

Sejalan dengan itu berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategi yang dirumuskan sebelumnya.

Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2018 disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 dan telah dirubah menjadi Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018 yang disusun tetap mengacu pada RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi, maka setiap tahunnya selama lima tahun kedepan, akan menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN.
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebagaimana telah dirubah pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018 adalah untuk memberikan gambaran arah yang jelas tentang rencana kinerja kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2017-2018

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Perumusan Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pengembangan / pembangunan jaringan Transportasi di Kota Jambi dalam jangka panjang dan dapat dipergunakan sebagai alat kendali oleh Pemerintah dari Legislatif maupun masyarakat dalam penyusunan Program Pembangunan di Bidang Transportasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017-2018 secara sistematika diuraikan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 VISI dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Jambi
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI YANG MENGACU
KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP.

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi yang secara definitif berjalan tanggal 31 Desember 2016 ditandai dengan pengukuhan ASN dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah semula terdiri satu Sekretariat dan empat Bidang melebur menjadi tiga Bidang dan satu Sekretariat dengan susunan antara lain Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Angkutan, Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Parkir.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi : Lalu lintas Angkutan, Pengendalian Operasional, Parkir dan Ketatausahaan.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

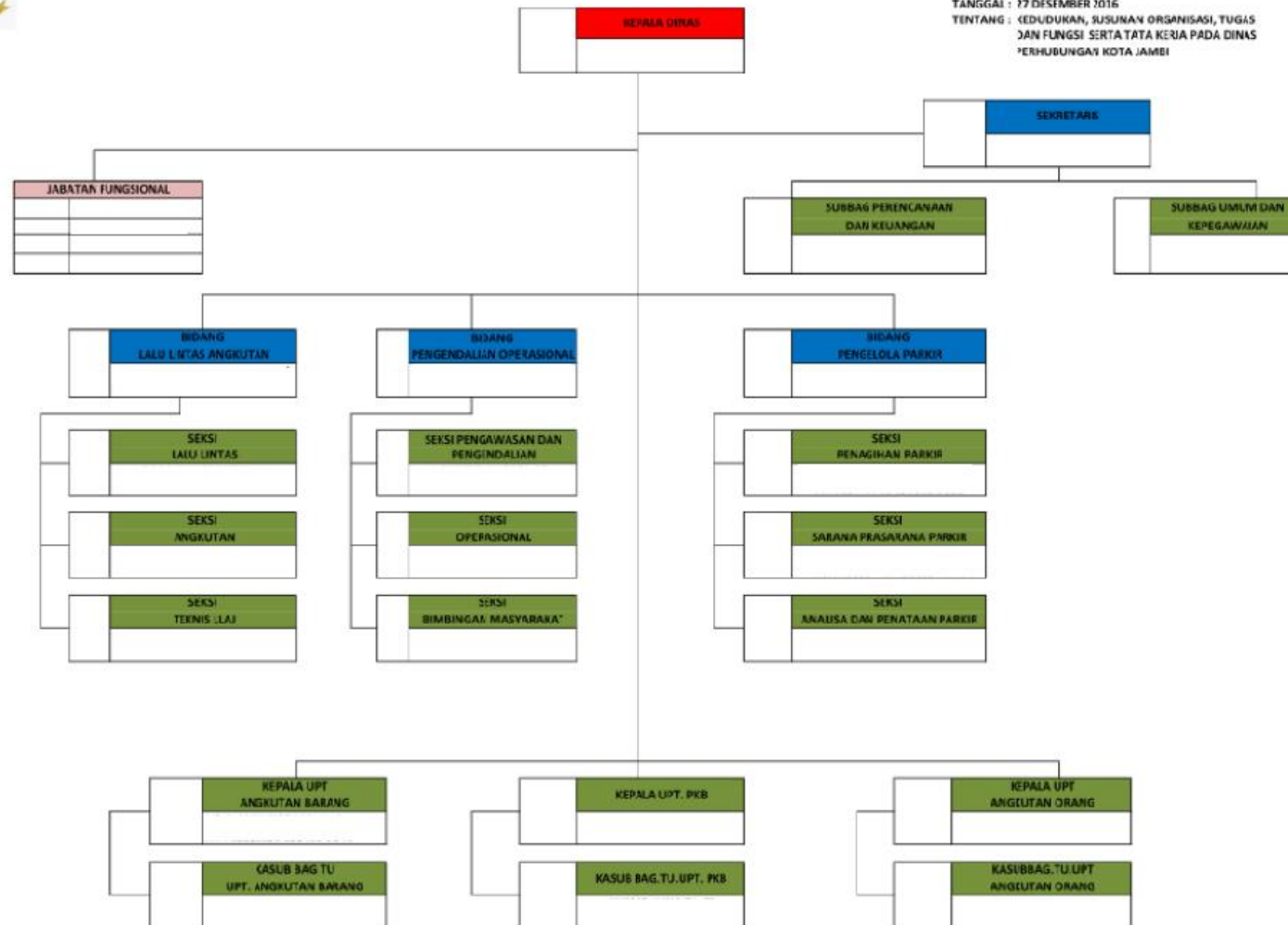
Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Jambi, maka mempengaruhi bentuk struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
2. Sekretaris membawahi Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan, membawahi Kasi Lalu Lintas, Kasi Angkutan dan Kasi Teknis LLAJ.
4. Kepala Bidang Pengendalian Operasional membawahi Kasi Pengawasan dan Pengendalian, Kasi Operasional dan Kasi Bimbingan Masyarakat.
5. Kepala Bidang Pengelola Parkir membawahi Kasi Analisa dan Penataan Parkir, Kasi Penagihan Parkir dan Kasi Sarana Prasarana Parkir.
6. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahi Kepala Tata Usaha Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kepala UPT Angkutan Barang, membawahi Kepala Tata Usaha Angkutan Barang.
8. Kepala UPT Angkutan Orang, membawahi Kepala Tata Usaha Angkutan Orang.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 46 TAHUN 2016
TANGGAL : 17 DESEMBER 2016
TENTANG : CEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA JAMBI



2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Jambi

Adapun komposisi pegawai Dinas Perhubungan Kota Jambi berdasarkan kepangkatan dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	DINAS	JUMLAH PER GOLONGAN																JLH
		I				II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	0	1	1	0	4	27	36	4	11	21	5	13	0	2	0	0	114

Data Tahun 2017

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	DINAS	PENDIDIKAN FORMAL							JML
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Dinas Perhubungan Kota Jambi	2	4	69	6	32	1	0	114

Data Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Negri Sipil yang mengabdikan diri di Dinas Perhubungan Kota Jambi sebanyak 114 orang dimana diantara menjabat 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 17 orang eselon IV.

Sedangkan tenaga kerja yang mengabdikan diri selain PNS di Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dimana sampai saat ini berjumlah sebanyak 115 orang TKK Dinas Perhubungan, 65 orang TKK dari Kantor Pengelola Parkir, Tenaga Sopir dan Petugas Jaga Kantor

Adapun aset Dinas Perhubungan yang dikelola selama ini yaitu :

Tabel 2.3

Aset Dinas Perhubungan Kota Jambi

No	Nama Barang	Jumlah / Unit	Ket.
1	Terminal Barang	1	
2	Terminal Penumpang/Angkot	1	
3	Gedung Pengujian	1	
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	17	
5	Kendaraan Dinas Roda Dua	51	
6	Speed Boat	2	
7	Dermaga Ponton	5	
8	Gerasi Speed Boat	1	
9	Senjata Api Genggam	10	
10	Pesawat HT	50	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2009-2013 secara rata-rata sesuai dengan perencanaan yang ditargetkan berdasarkan indikator-indikator yang tertuang pada RPJMD Kota Jambi khusus di bidang perhubungan pada sasaran Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan guna mewujudkan tujuan Menyediakan Infrastruktur dan utilitas kota yang mampu mendukung aktivitas masyarakat.

Adapun dua Indikator yang menjadi perhatian dalam pencapaian sasaran RPJMD Kota Jambi yaitu :

- 1) Peningkatan Rata-rata Ketersediaan Fasilitas Terminal
- 2) Peningkatan Rambu Untuk Keselamatan lalu lintas

Adapun target akhir dari indikator pertama adalah sebesar 100 % dengan pencapaian sekitar 95 % dalam lingkup perhatian sekitar penyediaan peningkatan kualitas sarana terminal yang ada agar mampu beroperasi secara maksimal. Dan indikator kedua target akhirnya sebesar 100 persen dengan pencapaian sekitar 90 persen dalam lingkup penyediaan rambu lalu lintas.

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 2.4.

Sedangkan perencanaan anggaran dan realisasinya dari Tahun 2009-2013 serta rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada table 2.5.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (%)					Realisasi Capaian Tahun ke-(%)					Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Peningkatan Rata-rata Ketersediaan Fasilitas Terminal	40 %			60	65	70	80	100	60	65	75	85	95	100	100	107	107	95
2	Peningkatan Rambu Untuk Keselamatan lalu lintas	60 %			30	40	50	75	100	30	40	50	80	90	100	100	100	107	90

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100,000	91,646	1,860,000	710,000	710,000	100,000	91,646	390,000	1,361,600	2,240,840	1.00	1.00	0.21	1.92	3.16	465%	158%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	720,500	619,600	850,000	850,000	850,000	720,500	619,600	677,000	1,898,940	1,110,010	1.00	1.00	0.80	2.23	1.31	6%	34%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	857,300	1,085,335	1,745,000	1,865,000	1,985,000	857,300	1,108,025	1,452,175	1,220,720	2,404,515	1.00	1.02	0.83	0.65	1.21	25%	35%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	625,000	696,075	1,500,000	1,000,000	1,000,000	625,000	696,075	1,135,500	1,914,940	2,500,000	1.00	1.00	0.76	1.91	2.50	23%	43%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	112,000	818,690	1,183,000	950,000	950,000	112,000	758,690	668,704	2,752,510	4,502,480	1.00	0.93	0.57	2.90	4.74	164%	235%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	400,000	-	1,500,000	3,000,000	3,500,000	400,000	-	-	4,602,000	2,612,150	1.00	-	-	1.53	0.75	4%	-36%

Data Anggaran dalam 1000 rupiah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kab/kota (untuk prov) dan Renstra SKPD prov. (untuk kab/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yg dibutuhkan.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas perhubungan Kota Jambi dalam analisis kebijakan Transportasi darat dalam Otonomi daerah berupa :

1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat.
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. pengembangan angkutan massal (Bus Rapid Transit) berbasis jalan raya, menurunkan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kehandalan angkutan umum.
4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sdp, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP
6. Memenuhi kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran yang aman dan tertib

Sedangkan pada analisis RTRW tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi berupa :

1. Peningkatan kinerja operasional terminal
2. Pembangunan rest area terpadu di Simpang Rimbo
3. Pembangunan terminal type C di Kelurahan Pasir Panjang
4. Pengembangan terminal angkutan barang pembantu di pasar angso duo
5. Pengembangan rute angkutan penumpang
6. Penataan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

Adapun Standar Pelayanan Minimal pada sektor perhubungan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk Pemerintah Kota antara lain :

1. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang telah ditetapkan Pemerintah
2. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek perintis dalam wilayah kota
3. Tersedianya halte pada setiap angkutan umum dalam trayek
4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada angkutan umum dalam trayek
5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada Jalan kab/kota
6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor
7. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal
8. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor
9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL dan Evaluasi Andalalin
10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
11. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
12. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau
13. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota
14. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kota
15. Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil
16. Tersedia pelabuhan sungai dan danau
17. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi
18. Dinas Perhubungan Kota Jambi akan melaksanakan operasi penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Jambi

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Adapun permasalahan yang masih menjadi pokok pikiran dalam perencanaan kedepan yang merupakan orientasi perbaikan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia bidang Teknis Perhubungan yang sangat minim.
2. Tempat Kerja Aparatur Dinas Perhubungan yang masih menggunakan Kantor Terminal.
3. Sarana dan Prasarana angkutan sungai dan danau yang belum layak dan memadai
4. Fasilitas utama dan pendukung di Terminal perlu perbaikan.
5. Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan yang masih kurang.
6. Pelayanan Angkutan Kota yang perlu ditingkatkan.
7. Kemacetan pada ruas dan persimpangan di jam-jam sibuk.
8. Perilaku pemakai lalu lintas dan angkutan jalan yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas.
9. Maraknya Parkir kendaraan di badan jalan dan tempat-tempat dilarang parkir.
10. Masih terdapatnya tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di luar terminal sehingga timbul terminal bayangan.
11. Belum tersedianya terminal angkutan barang pembantu.
12. Belum tersedianya angkutan massal yang murah dan nyaman.
13. Belum Optimalnya pengoperasian terminal angkutan barang kota jambi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas Dinas Perhubungan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang perhubungan yang meliputi : Lalu lintas dan Angkutan, Pengendalian Operasional, Pengelola Parkir dan Kesekretariatan, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang perhubungan;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas

Bila ditelaah dengan Visi, misi dan Tujuan Walikota dan Wakil Walikota maka Visi Kota Jambi adalah ***"Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya"*** dengan misi nya Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan yang tujuannya ***Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman,*** maka Dinas Perhubungan Kota harus mampu merumuskan kebijakan teknis di perhubungan agar tercapai Visi dan Misi Kota Jambi tersebut.

Untuk itu dalam pencapaian tujuan Kota Jambi dalam mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan

nyaman perlu diperhatikan dalam perbaikan permasalahan pelayanan perhubungan antara lain :

1. Peningkatan SDM bidang Teknis Perhubungan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana angkutan sungai dan danau
4. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu lintas Angkutan Jalan
5. Peningkatan Pelayanan Angkutan Kota
6. Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal
7. Pembangunan Halte Angkutan Umum
8. Penyediaan Angkutan masal
9. Peningkatan Ketertiban Masyarakat dalam berlalu lintas dan Parkir.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Adapun Kebijakan Prioritas pada sektor Pembangunan di Kementerian Perhubungan berupa:

1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat.
2. Peremajaan armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. Pengembangan angkutan massal.
4. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
5. Pembangunan ASDP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan sdp, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP.

Tentunya dengan kebijakan Kementerian Perhubungan diatas mendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam merencanakan program kegiatan masa depan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi telah ditetapkan penggunaan wilayah Kota Jambi terutama di bidang Perhubungan dimana penetapan penggunaan tata ruang tersebut memperhatikan perencanaan untuk 20 tahun kedepan. Adapun hal-hal yang ditetapkan dalam RTRW yang direncanakan dalam Rentra Dinas Perhubungan Kota Jambi antara lain :

1. pengembangan Terminal Barang Terpadu – Pasar Induk di Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru
2. Pengembangan rute angkutan penumpang
3. Pengembangan lalu lintas angkutan barang
4. pengembangan transportasi wisata Sungai Batanghari dan Danau dalam wilayah Kota Jambi

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Seperti yang telah diutarakan pada point 3.1 diatas maka secara garis besar permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi diantaranya :

1. Minimnya SDM teknis Perhubungan.
2. Sarana dan prasarana Perhubungan yang perlu di tingkatkan.
3. Pengembangan Rute Angkutan penumpang
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan danau.
5. Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan Parkir.

Tentu permasalahan diatas akan menjadi perhatian dalam perencanaan Dinas Perhubungan Kota Jambi ke depan sebagaimana tertuang dalam Renstra Program dan Kegiatan 5 tahun kedepan. Penuangan program dan kegiatan dalam renstra ini tentu memperhatikan pula apa yang ditetapkan dalam kebijakan di Kementrian Perhubungan, ketetapan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi

Visi Dinas Perhubungan Kota Jambi tahun 2013 – 2018 adalah :

***“Menjadikan Sistem Transportasi yang handal dan
terjangkau oleh Masyarakat”***

Adapun arti dari visi tersebut adalah sebagai penjabaran dan pendorong terwujudnya Visi Kota Jambi yaitu *Terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya*, maka peran transportasi yang meliputi lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, penerbangan dan moda lainnya harus handal artinya melayani masyarakat dan sektor sektor pembangunan segala bidang secara selamat, cepat, lancar, bersih, aman, nyaman dengan biaya transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Hal ini seiring jalan juga dengan salah satu misinya yaitu *Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan* dengan tujuan Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman.

Handal juga berarti dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi mengingat Kota Jambi sebagai Pusat Kegiatan Nasional maka kebijakan yang dilaksanakan harus dapat seiring dan bersinergi posisif dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Adapun Misi Dinas Perhubungan Kota Jambi sebagai langkah perwujudan Visi diatas adalah :

1. Mewujudkan Sistem Transportasi dan Saprass Perhubungan yang terpadu, aman dan nyaman.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kota Jambi

Dalam menetapkan misi maka Dinas Perhubungan menentukan tujuan – tujuan apa saja yang akan dicapai sehingga setelah ditetapkan tujuan maka sasaran-sasaran pun bisa ditentukan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ini adalah :

***“Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan
yang Terpadu dan Nyaman”***

Dari tujuan diatas maka sasaran-sasaran nya adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
2. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
3. Peningkatan Fungsi Ruang Parkir.

Adapun Target kinerja sasaran pertahun dapan secara jelas dilihat pada table 4.1 dibawah ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Jambi

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Jambi

VISI : MENJADIKAN SISTEM TRANSFORTASI YANG HANDAL DAN TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Data awal	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	KET.
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17	18
1	Membangun Infrastruktur Perkotaan yang merata dan berwawasan lingkungan	Mewujudkan Sistem Transportasi dan Sapras Perhubungan yang terpadu, aman dan nyaman	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Prasarana dan Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	persen	50%	58%	65%	73%	81%	88%	
			Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Persentase Ketertiban Masyarakat Mematuhi aturan LLAJ	persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Peningkatan Fungsi Ruang Parkir	Persentase Penerimaan dan Penataan Perparkiran	persen	72%	76%	80%	85%	89%	93%	

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Jambi

Adapun strategi-strategi yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 Strateginya :

- Meningkatkan Sarana Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan

Sasaran 2 Strateginya :

- Meningkatkan Pengawasan dan Penindakan.
- Meningkatkan Titik Parkir Resmi

Sedangkan kebijakan untuk strategi diatas antara lain :

1. Mendorong Pembangunan Sarana Prasana dan Fasilitas Keselamatan Perhubungan.
2. Mendorong Ketertiban dan Kesadaran Masyarakat.
3. Mendorong Keteraturan dan Penerimaan PAD Parkir.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Adapun Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2014 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pngemudi, Pramubakti dan Penjaga malam.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Gedung Kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan mebeleur
4. Pengadaan peralatan perkantoran
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor
- 3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
- 4. Perencanaan SKPD**
 1. Renstra SKPD
 2. Penyusunan Renja SKPD
- 5. Peningkatan Disiplin Aparatur**
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
 1. Pendidikan dan pelatihan formal
 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**
 1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB
 2. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana alat PKB
 3. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan
 4. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana lalin darat dan perairan
- 8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**
 1. Pembangunan Gedung Terminal
 2. Pembangunan Halte
- 9. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**
 1. Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 2. Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

3. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
4. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan
5. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

10. Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
2. Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang
3. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
4. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
5. Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan
6. Fasilitas Perijinan dibidang Perhubungan
7. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
8. Koordinasi dalam Peningkatan pelayanan Angkutan (Forum LLAJ)
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
10. Kegiatan Penciptaan disiplin/tertib berlalu lintas di jalan/sungai

11. Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2. Pengadaan marka jalan
3. Pengadaan pagar pengaman jalan (Barrier Gate, Traffic Cone dll)

12. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Pemeliharaan Aset PKB
2. Pengadaan Alat PKB
3. Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya terjadi penyesuaian program dan kegiatan dengan ditetapkan RPJMD Kota Jambi 2013-2018.

Adapun Nama program dan Kegiatan yang dimaksud dalam RPJMD Kota Jambi 2013-2018 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
11. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pngemudi, Pramubakti dan Penjaga malam.
12. Perjalanan Dinas

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Gedung Kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan mebeleur
4. Pengadaan peralatan perkantoran
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

6. Perencanaan SKPD

1. Renstra SKPD
2. Penyusunan Renja SKPD

7. Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

1. Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan
2. Peningkatan Pengelolaan Pelayaran dan Udara

8. Peningkatan pengelolaan dan Keselamatan perhubungan

1. Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan

9. Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran

1. Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi
2. Penertiban Sarana Parkir
3. Peningkatan sarana dan prasarana perkarkiran

Adapun rincian perencanaan pendanaan setiap program kegiatan yang ditargetkan setiap tahunnya dapat dilihat secara rinci pada table 5.1

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Jambi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA			NO	PROGRAM	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA								
							Data awal	Tahun					Tahun		Tahun		Tahun				
								2013	Dana (Rp.)				2014	Dana (Rp.)	2015	Dana (Rp.)	2016	Dana (Rp.)	2017	Dana (Rp.)	2018
Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	Terwujudnya Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan	Peningkatan Potensi SDM yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan	Tersedianya ASN yang dapat menunjang peningkatan pelayanan dan kualitas pekerjaan	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terlaksananya pelayanan dan administrasi bidang perhubungan sesuai dengan standar		1.149.000.000		1	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terlaksananya pelayanan dan administrasi bidang perhubungan sesuai dengan standar	1.210.500.000		1.331.550.000		1.464.705.000		1.611.175.500		
				2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan petugas dalam melaksanakan tupoksinya		2.745.445.000		2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan petugas dalam melaksanakan tupoksinya	11.700.000.000		6.867.000.000		3.539.000.000		3.726.000.000		
				3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	100%	20.000.000	100%	3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	20.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	
					01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksanya pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan	2 laporan	20.000.000	2 laporan		01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksanya pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan	20.000.000	2 laporan	25.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	35.000.000	2 laporan	
				4	Perencanaan SKPD	Terlaksananya proses perencanaan SKPD	100%	20.000.000	100%	4	Perencanaan SKPD	Terlaksananya proses perencanaan SKPD	15.000.000	100%	17.500.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	
					01 Renstra SKPD	Terlaksananya penyusunan renstra dishub		5.400.000	1 laporan		01 Renstra SKPD	Terlaksananya penyusunan renstra dishub	-	-	-	-	-	-	15.000.000	1 laporan	
					02 Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya pelaporan Rencana Kerja Dinas Perhubungan	6 laporan	14.600.000	6 laporan		02 Penyusunan Renja SKPD	Terlaksananya pelaporan Rencana Kerja Dinas Perhubungan	15.000.000	6 laporan	17.500.000	6 laporan	20.000.000	6 laporan	25.000.000	6 laporan	
				5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai dan petugas lapangan		220.500.000		5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai dan petugas lapangan	220.000.000		250.000.000		285.000.000		320.000.000		
					02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya standarisasi keseragaman pakaian	1 Paket	180.500.000	1 Paket		02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya standarisasi keseragaman pakaian	180.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	225.000.000	1 Paket	250.000.000	1 Paket	
					05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tercapainya keseragaman pakaian khusus	1 Paket	40.000.000	1 Paket		05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tercapainya keseragaman pakaian khusus	40.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	70.000.000	1 Paket	
				6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perhubungan		315.000.000		6	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perhubungan	350.000.000		385.000.000		430.000.000		475.000.000		
					01 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan SDM Perhubungan di bidang Teknis	10 orang	185.000.000	10 orang		01 Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan SDM Perhubungan di bidang Teknis	210.000.000	10 orang	225.000.000	10 orang	250.000.000	10 orang	275.000.000	10 orang	
					02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya peningkatan pengetahuan peraturan untuk aparatur	1 kali	50.000.000	1 kali		02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya peningkatan pengetahuan peraturan untuk aparatur	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	65.000.000	1 kali	75.000.000	1 kali	
					03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan SDM perhubungan di bidang Peraturan perundang-undangan	1 kali	80.000.000	1 kali		03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan SDM perhubungan di bidang Peraturan perundang-undangan	85.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	115.000.000	1 kali	125.000.000	1 kali	
Mewujudkan Sistem Transportasi dan Sapras Perhubungan yang terpadu, aman dan nyaman	Penurunan Titik kemacetan dan peningkatan kendaraan laik jalan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan		2.412.135.000		7	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	10.225.000.000		27.409.000.000		35.050.500.000		28.135.000.000		
					01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB	terlaksananya Kalibrasi Peralatan PKB	1 kali	100.000.000	1 kali		- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat PKB	terlaksananya Kalibrasi Peralatan PKB	150.000.000	1 kali	165.000.000	1 kali	180.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	
					02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana alat PKB	terlaksananya penggantian suku cadang alat PKB	1 unit	410.000.000	1 unit		- Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana alat PKB	terlaksananya penggantian suku cadang alat PKB	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	125.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	
					04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan	terlaksananya pemeliharaan terminal/dermaga	1 kali	752.135.000	1 kali		- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal / pelabuhan	terlaksananya pemeliharaan terminal/dermaga	800.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.500.000.000	1 kali	2.000.000.000	1 kali	
					05 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana lalin darat dan perairan	terlaksananya perawatan Fasilitas keselamatan lalu lintas	1 kali	1.150.000.000	1 kali		- Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana lalin darat dan perairan	terlaksananya perawatan sarana dan prasarana lalin darat dan perairan	1.500.000.000	1 kali	1.750.000.000	1 kali	2.000.000.000	1 kali	2.500.000.000	1 kali	
				8	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Tersedianya terminal dan halte	0%	1.500.000.000	0%												
					1 Pembangunan Halte	Tersedianya halte pada setiap angkutan umum dalam trayek (SPM)	0%	-	0%		- Pembangunan Halte	Tersedianya halte pada setiap angkutan umum dalam trayek (SPM)	1.000.000.000	20%	1.200.000.000	40%	1.500.000.000	60%	2.000.000.000	80%	
				9	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	14%	2.082.000.000													
					1 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	tersedianya perencanaan/DED Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		320.000.000	1 Paket		2	Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	tersedianya perencanaan/DED Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	450.000.000	1 Paket	500.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	1.000.000.000	1 Paket
					2 Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang pembangunan perhubungan	tersedianya kajian dan study pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		500.000.000	2 kajian			tersedianya kajian dan study perhubungan	1.000.000.000	4 kajian	1.100.000.000	4 kajian	1.200.000.000	4 kajian	1.500.000.000	4 kajian	
					6 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau		800.000.000			3	Peningkatan Pengelolaan Pelayaran dan Udara	terlaksananya peningkatan pengelolaan pelayaran dan udara	1.400.000.000		6.400.000.000		6.400.000.000		6.400.000.000	
					1. Pembangunan Pelabuhan Angkutan Sungai	Tersedia pelabuhan sungai dan danau (SPM)	-				- Pembangunan Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedia pelabuhan sungai dan danau (SPM)	-		5.000.000.000	2 Paket	5.000.000.000	2 Paket	5.000.000.000	2 Paket	
					2. Pembangunan Dermaga Apung	Tersedianya dermaga apung untuk prasarana transportasi angkutan sungai		800.000.000	1 Paket		- Pembangunan Dermaga Apung	Tersedianya dermaga apung untuk prasarana transportasi angkutan sungai dan Danau	850.000.000	1 Paket	850.000.000	1 Paket	850.000.000	1 Paket	850.000.000	1 Paket	
					5. Penertiban standar keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi (SPM)					- Pengadaan peralatan keselamatan angkutan sungai dan danau	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi (SPM)	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	
				11	Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada Jalan dalam wilayah Kota Jambi (SPM)	50%	1.719.200.000	58%		Peningkatan pengelolaan dan Keselamatan perhubungan										
					01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terlaksananya pengadaan rambu lalu lintas	60%	428.000.000	68%		01 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan	Terlaksananya peningkatan keselamatan lalu lintas	2.500.000.000	65%	2.750.000.000	73%	3.050.000.000	81%	3.500.000.000	88%	
											- Pengadaan Rambu lalu lintas	Terlaksananya pengadaan rambu lalu lintas	500.000.000	76%	550.000.000	84%	650.000.000	92%	800.000.000	100%	
					02 Pengadaan marka jalan	Terlaksananya pengadaan marka jalan	30%	428.000.000	40%		- Pengadaan marka jalan	Terlaksananya pengadaan marka jalan	1.000.000.000	50%	1.100.000.000	60%	1.200.000.000	70%	1.350.000.000	80%	
					03 Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)	Terlaksananya pengadaan Guardrill	60%	863.200.000	65%		- Pengadaan pagar pengaman jalan	Terlaksananya pengadaan Guardrill	1.000.000.000	70%	1.100.000.000	75%	1.200.000.000	80%	1.350.000.000	85%	
				12	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor (SPM)	42%	3.535.220.000			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	1.090.000.000		1.199.000.000		1.300.000.000		1.430.000.000		
					1 Pembangunan Balai PKB	Terlaksananya peningkatan sistem pengujian kendaraan bermotor	75%	3.000.000.000	1 Paket		- Pembangunan Balai PKB	Terlaksananya peningkatan sapra balai pengujian kendaraan bermotor	500.000.000	1 Paket	550.000.000	1 Paket	600.000.000	1 Paket	660.000.000	1 Paket	
					2 Pengadaan Alat PKB	Terlaksananya peningkatan kapasitas peralatan pengujian	50%	500.000.000	1 unit		- Pengadaan Alat PKB	Terlaksananya peningkatan kapasitas peralatan pengujian	550.000.000	1 unit	605.000.000	1 unit	650.000.000	1 unit	715.000.000	1 unit	
					3 Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya pengukuran kelaikan kendaraan bermotor dalam beberapa sampel	0	35.220.000	1 kali		- Pelaksanaan Uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya pengukuran kelaikan kendaraan bermotor dalam beberapa sampel	40.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	
					7 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya peningkatan terminal angkutan penumpang dan barang	70%	150.000.000	1 Paket		- Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Tersedianya peningkatan terminal angkutan penumpang dan barang	-		-		300.000.000	1 Paket	330.000.000	1 Paket	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA			NO	PROGRAM	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA							
							Data awal	Tahun					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	
								2013	Dana (Rp.)				2014	Dana (Rp.)	2015	Dana (Rp.)	2016	Dana (Rp.)	2017	Dana (Rp.)
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian Lalu lintas	Terwujudnya Peningkatan pengawasan dan pengendalian Lalu lintas	10	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya peningkatan pelayanan angkutan		2.944.500.000												
					1 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Terciptanya peningkatan keselamatan penumpang dari sisi sopir/juru mudi	1 kali	50.000.000	1 kali		- Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	Terciptanya peningkatan keselamatan penumpang dari sisi sopir/juru mudi	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	65.000.000	1 kali
					3 Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang	Terciptanya peningkatan keselamatan penumpang dari sisi pengelola angkutan penumpang		25.000.000	1 kali		- Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna keselamatan penumpang	Terciptanya peningkatan keselamatan penumpang dari sisi pengelola angkutan penumpang	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	65.000.000	1 kali
					5 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Tersedianya angkutan umum dalam trayek tetap dan perintis		130.000.000			- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Tersedianya angkutan umum dalam trayek tetap dan perintis	100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000	
					1. Evaluasi dan Pengawasan Angkutan Kota dalam trayek	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang telah ditetapkan Pemerintah (SPM)		130.000.000	1 kali		1. Evaluasi dan Pengawasan Angkutan Kota dalam trayek	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang telah ditetapkan Pemerintah (SPM)	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	65.000.000	1 kali
					2. Evaluasi dan Pengawasan Angkutan perintis	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek perintis dalam wilayah kota (SPM)		-	1 kali		2. Evaluasi dan Pengawasan Angkutan perintis	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek perintis dalam wilayah kota (SPM)	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	65.000.000	1 kali
					6 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terciptanya keamanan dan kenyamanan terminal	12 bulan	822.000.000	12 bulan		- Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Terciptanya keamanan dan kenyamanan terminal	1.500.000.000	12 bulan	1.650.000.000	12 bulan	1.815.000.000	12 bulan	2.000.000.000	12 bulan
					11 Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Tersedianya data base pelayanan angkutan		77.500.000	1 kali		- Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Tersedianya data base pelayanan angkutan	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	1 kali	65.000.000	1 kali
					13 Fasilitas Perijinan dibidang Perhubungan	Terlaksananya pengadaan perlengkapan seluruh perijinan perhubungan	1 Paket	675.000.000	1 Paket		- Fasilitas Perijinan dibidang Perhubungan	Terlaksananya pengadaan perlengkapan seluruh perijinan perhubungan	700.000.000	1 Paket	750.000.000	1 Paket	845.000.000	1 Paket	930.000.000	1 Paket
					15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terlaksananya Pengiriman peserta tingkat Provinsi	1 kali	150.000.000	1 kali		- Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terlaksananya Pengiriman peserta tingkat Provinsi	155.000.000	1 kali	170.000.000	1 kali	185.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali
										8	Peningkatan pengelolaan dan Keselamatan perhubungan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan	4.600.000.000		4.900.000.000		550.000.000		605.000.000	
					16 Koordinasi dalam Peningkatan pelayanan Angkutan (Forum LLAJ)	Terlaksananya pengambilan keputusan dalam permasalahan LLAJ		400.000.000	6 kali		- Koordinasi dalam Peningkatan pelayanan Angkutan (Forum LLAJ) dan WTN	Terlaksananya pengambilan keputusan dalam permasalahan LLAJ dan ikut Lomba WTN	600.000.000	6 kali	650.000.000	6 kali	700.000.000	6 kali	750.000.000	6 kali
					18 Kegiatan Penciptaan disiplin/tertib berlalu lintas di jalan/sungai	Terpenuhinya standar keselamatan angkutan umum dan kapal sungai dan danau		500.000.000	1 Kegiatan		2 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan	Terpenuhinya standar keselamatan angkutan umum dan kapal sungai dan danau	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	11 bulan
					- Penertiban Angkutan Umum	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di		500.000.000	1 Kegiatan		- Penertiban dan Pengendalian Kelancaran Arus Lalu lintas	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian	1.000.000.000	11 bulan	1.000.000.000	11 bulan	1.000.000.000	11 bulan	1.000.000.000	11 bulan
					4 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terpenuhinya pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan aturan perhubungan		312.000.000	6 kali		- Penegakan Hukum / Razia	Jumlah Penindakan yang dilakukan	500.000.000	40 kali	500.000.000	40 kali	550.000.000	40 kali	600.000.000	40 kali
											- Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah Bimbingan Masyarakat	250.000.000	10 kali	250.000.000	10 kali	300.000.000	10 kali	350.000.000	10 kali
										9	Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Terlaksananya peningkatan Titik Parkir Resmi	-		-		2.700.000.000		2.961.258.000	
											1 Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi	Jumlah Penerimaan Retribusi					2.000.000.000	4, 5 Milyar	1.461.258.000	5 Milyar
											2 Penertiban Sarana Parkir	Jumlah Juru Parkir Resmi					500.000.000	170 orang	500.000.000	175 orang
											3 Peningkatan sarana dan prasarana perpakiran	Jumlah Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Parkir					200.000.000	2 Paket	1.000.000.000	5 Paket
					RATA-RATA / JUMLAH			18.663.000.000				28.340.500.000		41.185.050.000		41.369.205.000		34.947.175.500		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sesuai Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perhubungan, maka indikator Dinas Perhubungan Kota Jambi yang terkait dengan RPJMD ditunjukkan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	Penignkatan Fasilitas Terminal Penumpang dan Barang	31%	40%	52%	68%	87%	95%
2	Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas	50%	58%	65%	73%	81%	88%

BAB VII

PENUTUP

Dengan ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam perencanaan StrategiS Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 merupakan keputusan yang mendasar bagi operasionalisasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan organisasi.

Selanjutnya dalam rangka membangun sistim kinerja dan akuntabilitas diperlukan proses penyusunan konsep dasar penyuluhan dan perumusan indikator kinerja.

Akhirnya keberhasilan penyusunan Renstra ini terlihat pada upaya mengimplementasikan program dalam tindak nyata, efektif dan efisien dan harus konsisten dengan kompetisi dan transparansi.

Demikianlah Renstra Dinas Perhubungan ini dibuat kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam menunjang dan mengukur Akuntabilitas Aparat Pemerintah.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan : Perhubungan

SKPD : Dinas Perhubungan Kota Jambi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan dan administrasi bidang perhubungan sesuai dengan standar		2.026.885.000,00
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor		26.400.000,00
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber komunikasi, air dan kantor		267.960.000,00
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas		50.000.000,00
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	tersedianya honor pengelola keuangan		350.000.000,00
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terlaksananya kebersihan kantor		187.900.000,00
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya keperluan atk administrasi dan pelayanan kantor		79.550.000,00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya keperluan cetakan dan penggandaan administrasi dan pelayanan kantor		94.675.000,00
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik/penerangan kantor		15.000.000,00
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	tersedianya makan minum rapat untuk peningkatan administrasi dan pelayanan kantor		40.000.000,00
	19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		42.600.000,00
	20 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	tersedianya honor petugas keamanan kantor dan terminal		472.800.000,00
	21 Perjalanan Dinas	Tercapainya konsultasi dan koordinasi ke instansi terkait		400.000.000,00
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dan petugas dalam melaksanakan tupoksinya		1.618.500.000,00
	05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			75.000.000,00
	10 Pengadaan Mebeleur			-
	11 Pengadaan Peralatan Perkantoran			180.000.000,00
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			250.000.000,00
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			1.050.000.000,00
	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			20.000.000,00
	30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor			43.500.000,00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai dan petugas lapangan		445.520.000,00
	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			445.520.000,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3	4	5
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Perhubungan		100.000.000,00
	01 Pendidikan dan Pelatihan Formal			100.000.000,00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD		8.800.000,00
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.800.000,00
08	Program Perencanaan SKPD	Terlaksananya proses perencanaan SKPD		20.000.000,00
	01 Penyusunan Renstra SKPD			15.000.000,00
	02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD			5.000.000,00
21	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan		3.065.100.000,00
	02 Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan			158.400.000,00
	03 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan			2.906.700.000,00
22	Program Peningkatan Pengelolaan dan Keselamatan Perhubungan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan		1.382.200.000,00
	01 Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan			982.200.000,00
	02 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan			400.000.000,00
23	Program Peningkatan Mutu dan Perluasan Kapasitas Pelayanan Perpajakan	Terlaksananya peningkatan pengelolaan Perpajakan		2.281.260.000,00
	01 Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi			1.728.260.000,00
	02 Penertiban Sarana Parkir			353.000.000,00
	03 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpajakan			200.000.000,00
				10.948.265.000,00



 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI
 DINAS PERHUBUNGAN
 S. SALEH RIDHA, S.STP
 NIP. 19800908 199810 1 001



PEMERINTAH KOTA JAMBI INSPEKTORAT

Jln. Kapten A. Zaidi Saleh – Kota Baru Tel. (0741) 41239

Email : inspektorat@jambikota.go.id

J A M B I -36127

Jambi, 30 April 2018

Nomor	: 700/04.5/INSP/2018	Kepada Yth,
Sifat	: Penting	Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kota Jambi
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017	di -- Jambi

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Kota Jambi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi Pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta untuk mendorong adanya peningkatan Kinerja

Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi Pemerintah Kota Jambi untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

2. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan Kota Jambi, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang lingkup evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Kinerja ; dan
- Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (RENSTRA), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dokumen terkait lainnya.

4. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Hasil evaluasi yang kami lakukan pada Dinas Perhubungan Kota Jambi memperoleh nilai **26,97** dengan kategori **(D) Sangat Kurang**.
Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Jambi dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT (%)	HASIL EVALUASI (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30	6,63
	Dari hasil evaluasi ditemui kekurangan : 1) Rencana Strategis (RENSTRA) • Tidak ada indikator tujuan , • Tidak menyajikan IKU; • Indikator kinerja sasaran (output dan outcome) tidak berorientasi hasil (hanya fokus pada rencana kegiatan); • Tidak dipublikasikan. 2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) : • ☒ Belum memenuhi Indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil; • PK belum dipublikasikan.		
2.	Pengukuran Kinerja	25	8,44
	Dari hasil evaluasi ditemui kekurangan : Indikator Kinerja Utama (IKU) belum berorientasi hasil dan dipublikasikan.		
3.	Pelaporan Kinerja	15	4,55
	Dari hasil evaluasi ditemui kekurangan : • Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU; • Laporan kinerja tidak menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome; • Laporan kinerja tidak menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan; • Laporan Kinerja tidak menyajikan perbandingan data kinerja tahun sebelumnya; • Laporan Kinerja tidak diupload ke dalam website.		
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,12
	Dari hasil evaluasi ditemui kekurangan : Data evaluasi kinerja sudah tersaji tetapi belum mencapai bobot capaian karena kriteria setiap butir penilaian saling berkaitan.		
5.	Pencapaian Kinerja	20	2,50
	Dari hasil evaluasi ditemui kekurangan : Data capaian kinerja belum tersaji dan Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan.		
Jumlah		100	26,97

Perhitungan Hasil Evaluasi terlampir.

6. Terhadap penilaian yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

1) Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) :

- Harus ada indikator tujuan ;
- Harus menyajikan IKU;
- Indikator kinerja sasaran (output dan outcome) harus berorientasi hasil (tidak hanya fokus pada rencana kegiatan);
- Harus dipublikasikan

2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT):

- Harus memenuhi Indikator kinerja sasaran yang berorientasi hasil;
- PK harus dipublikasikan

b. Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) harus berorientasi hasil dan dipublikasikan.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja harus menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- Laporan kinerja harus menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome;
- Laporan kinerja harus menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan;
- Laporan Kinerja harus menyajikan perbandingan data kinerja tahun sebelumnya;
- Laporan Kinerja harus diupload ke dalam website.

d. Evaluasi Kinerja

Data evaluasi kinerja sudah tersaji tetapi belum mencapai bobot capaian karena kriteria setiap butir penilaian saling berkaitan.

e. Capaian Kinerja

Data capaian kinerja sudah tersaji dan informasi mengenai kinerja harus dapat diandalkan.

CASCADING RPJMD KE RENSTRA



CASCADING INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA (PK KEPALA)

Persentase Sarana Prasarana
dan Pengelolaan Fasilitas
Keselamatan Perhubungan

Persentase Ketertiban Masyarakat
Mematuhi aturan LLAJ

Persentase Penerimaan
dan Penataan Perparkiran

Persentase Pembangunan dan
Pemeliharaan Sarana Prasarana dan
Fasilitas Keselamatan Perhubungan

Persentase Ketertiban Lalu
Lintas

Persentase Peningkatan
Pelayanan Perparkiran

- Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan
- Jumlah Peraturan yang diterbitkan

- Jumlah Buku Uji yang diterbitkan
- Jumlah Rekomendasi Izin Trayek yang diterbitkan

- Jumlah Rambu Terpasang
- Jumlah APILL yang Terpelihara
- Jumlah Marka yang Terpasang

Jumlah Pengawasan dan
Pengendalian

Jumlah Penindakan yang
dilakukan

Jumlah Bimbingan
Masyarakat

Jumlah Penerimaan
Retribusi

Jumlah Parkir yang Tertata

Jumlah
Pengadaan/Pemeliharaan
Sarana Parkir